

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO KUPEDES
DI BANK RAKYAT INDONESIA
(STUDI PADA KANTOR CABANG BRI KENDAL)**

TESIS

Magister Kenotariatan



oleh :

**DESRA NATASHA WARGANEGARA, SH.
B4B 003 070**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

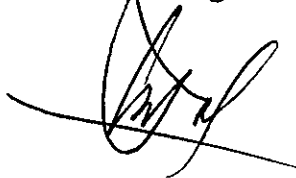
TESIS
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO KUPEDES
DI BANK RAKYAT INDONESIA
(STUDI PADA KANTOR CABANG BRI KENDAL)

oleh :

DESRA NATASHA WARGANEGARA, SH.
B4B 003 070

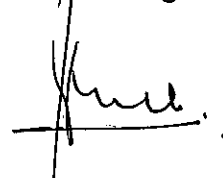
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing I



H. ACHMAD BUSRO, S.H, M.Hum.
NIP. 130 606 004

Pembimbing II



YUNANTO, SH, MHum.
NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



MULYADI, S.H. M.S.
NIP. 130 529 429

ABSTRAK

Selama ini dalam praktek, perlakuan hukum yang berbeda yang diterapkan pada perjanjian kredit Mikro Kupedes adalah antara lain :

1. Perjanjian kredit mikro Kupedes dilakukan dengan akta perjanjian di bawah tangan, berbeda dengan perjanjian dalam kredit lainnya yang dibuat dengan akta perjanjian notariil ;
2. Jaminan dalam kredit makro Kupedes tidak terlalu besar, bahkan untuk penyaluran kredit dengan nilai 2 (dua) juta Rupiah dilaksanakan tanpa jaminan ;
3. Karakter debitur lebih diutamakan, dalam penilaian penyaluran kredit mikro Kupedes;
4. Prospek usaha dan kesehatan pembukuan dari usaha debitur dalam kredit mikro Kuepedes tidak terlalu diperhatikan, tetapi dalam kredit lainnya hal tersebut penting dalam pencairan kredit.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan perjanjian kredit mikro Kupedes dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal dengan Debitur dan Upaya yang dapat ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya jika debitur wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Perjanjian kredit mikro kupedes dalam praktek dilaksanakan dengan sederhana dan tidak berbelit-belit, pelaksanaan perjanjian kredit mikro ini karena sangat sederhana menjadikan prosesnya cepat namun juga memiliki kelemahan, seperti seringnya dimasukkan jenis usaha yang sebenarnya tidak berprospek dan tidak memiliki manajemen yang baik berupa pembukuan usaha.

Berkaitan dengan proses penyaluran kredit mikro kupedes yang sederhana tersebut, seringkali pembebanan benda penjamin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai prosedur penjaminan dalam lembaga jaminan yang digunakan, sehingga sering penyelesaiannya ditempuh dengan penagihan dan desakan kepada debitur untuk menuntut kapan debitur dapat membayar angsurannya, beruntung dalam penyaluran kredit mikro kupedes, BRI unit berhubungan dengan masyarakat strata sosial menengah yang umumnya mempunyai rasa malu yang tinggi .

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005

Yang menyatakan,

DESRA NATASHA WARGANEGARA, SH.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat serta Perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO KUPEDES DI BANK RAKYAT INDONESIA (STUDI PADA KANTOR CABANG BRI KENDAL)". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis, kakak dan adik-adik penulis yang penulis cintai.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada *Benedie Agustri Hari* suami penulis serta seluruh pihak-pihak yang telah mendorong

dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak *PROF. IR. EKO BUDIHARDJO, MSC* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. ACHMAD BUSRO, SH., MHum.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta pembimbing penulis yang telah banyak membantu meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
4. Bapak *MULYADI, SH.,M.S.,* Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *YUNANTO, SH.,MHum* Selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.

9. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa kepada teman-tamanku Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2003, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan perhatiannya memberi dukungan do'a serta berperan penting dalam diskusi-diskusi dengan penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadarnya kurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

DESRA NATASHA WARGANEGARA, SH

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF KUPEDES MICRO CREDIT AGREEMENT IN BRI (A Case Study in BRI Branch Office Kendal)

So far in practice, different legal treatments applied on Kupedes micro credit such as:

1. The agreement of Kupedes micro credit was conducted by a under hand agreement certificate, whereas another credit agreement was made by notary agreement certificate.
2. Collateral in Kupedes micro credit was not so big, even for credit value of 2 (two) million Rupiah was conducted without collateral.
3. Debtor character was concerned more in the appraisal of Kupedes micro credit
4. The business prospect and accounting management of debtor's business in Kupedes micro credit was not really concerned, but in another credit the matters were very important in credit clearance.

The purpose of this paper was to recognize and to analyze the implementation of Kupedes micro credit agreement in practice between Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kendal Branch and debtors, and the efforts to do by Bank Rakyat Indonesia (BRI) in gaining its account receivable settlement if the debtors were non-fulfillment.

The research method applied was through juridical empiric by collecting primary and secondary data.

Kupedes micro credit agreement in practice was simply conducted and not complicated. Because its simplicity, the process was fast but had some weaknesses such as the businesses with no prospect and didn't have good accounting management were approved for credit.

Concerning the simple credit approval process of Kupedes micro credit, frequently the collateral charging was not conducted properly according to the underwriting procedure in the underwriter institution used, so that the settlement was done by collecting and pressure to debtors to demand when the debtors can pay their installment. Fortunately, in Kupedes micro credit, BRI unit had relations with middle class community, which generally has high disgrace.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Asas Perjanjian	10
3. Syarat Sahnya suatu Perjanjian	14
4. Wanprestasi dalam Perjanjian	16
B. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit	19
C. Penyaluran Kredit oleh Bank Rakyat Indonesia	25
D. Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)	27
E. Jaminan.....	29
1. Pengertian Jaminan	29
2. Kredit Konkuren dan Preferent	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Sampling	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia	41
2. Kredit Mikro Kupedes	44
3. Perjanjian Kredit Mikro dalam Praktek	47
4. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kredit Mikro Kupedes	48
B. Pembahasan	
1. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Kupedes dalam Praktek antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal dengan Debitor	53
2. Analisis Upaya yang dapat Ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Memperoleh Kembali Pelunasan Piutangnya jika Debitur Wanprestasi	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan milik Pemerintah bertugas sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan berfungsi sebagai lembaga penyalur kredit yang diharapkan sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. Penyaluran kredit diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat karena adanya aktivitas perdagangan dan industri yang terkait.

Bagi bank penyaluran kredit merupakan aktivitas operasional perbankan guna menjual dana yang terkumpul sehingga pemasaran kredit dapat menghasilkan pendapatan bunga pinjaman, yang menjadi sumber pendapatan untuk operasional perbankan dan selanjutnya dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah selaku pemilik saham dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Untuk itu kredit yang disalurkan diharapkan dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi berupa pendapatan bunga pinjaman dan sekaligus diharapkan tingkat resiko yang minimal atas

penyaluran kredit seperti tidak terdapat tunggakan terhadap pokok dan bunga pinjaman atau terdapat kredit macet atau timbul masalah dari penyaluran kredit.

Setiap terjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) maka akan menimbulkan beban biaya dalam pembukuan operasional bank bersangkutan yang berdampak mengurangi tingkat margin suatu bank¹.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam operasi perbankan dikenal sebagai bank-nya *wong cilik*, yang daya jangkau dan pelayanannya banyak tersebar di pedesaan dan sangat luas beroperasi di seluruh Kecamatan yang ada. Akses perbankan terhadap masyarakat pedesaan merupakan riwayat dari misi yang diemban Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak didirikan mulai tahun 1895².

Pemerintah selaku pemilik Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadikan bank ini semula sebagai penyalur kredit Bimas maupun kredit program lainnya yang bertujuan guna mengentaskan kemiskinan ekonomi masyarakat pedesaan. Setelah melalui proses

¹ Dalam teknis operasional perbankan, maka pembukuan digolongkan pada kualitas kredit : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Ketentuan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang "*Kualitas Aktiva Produktif*".

² Iwan Pramono, Kepala Cabang BRI Kendal (sekarang Mantan Kacab BRI Kendal), wawancara tanggal 30 Maret 2005.

evolusi perbankan maka Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menjelma menjadi bank umum yang juga bersifat komersial walaupun masih ada tugas mengemban misi pemerintah dengan tetap menyalurkan kredit dengan pola skim mikro untuk masyarakat pedesaan³.

Kredit dengan pola skim mikro yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan tersebut dalam Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinamakan dengan produk Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dalam bentuk simpanan masyarakat dinamakan produk Simpedes (Simpanan Masyarakat Pedesaan), kredit mikro Kupedes dimaksudkan sebagai produk bantuan modal usaha kecil, yang sebagian besar merupakan usaha di pedesaan.

Usaha-usaha yang kecil yang menjadi sasaran tujuan penyaluran kredit mikro kupedes mulai dari bidang usaha pertanian, peternakan dan jasa, bahkan kupedes juga diperuntukkan bagi pegawai berpenghasilan tetap.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menyalurkan kredit Kupedes bagi masyarakat pedesaan disusun dalam perjanjian di bawah tangan, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena di samping debitur

³Hasil kesimpulan dalam wawancara dengan Sukirno Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Kendal, prasurvey tanggal 31 Maret 2005.

kredit Kupedes biasanya hanya mempunyai sistim pembukuan yang sederhana, bahkan terkadang para debitur dengan besaran di bawah Rp. 50 Juta rata-rata tidak mempunyai catatan pembukuan, karena biasanya hanya mengandalkan ingatan saja. Sedang jenis usaha yang ditekuni lingkupnya sederhana dan simple.

Selama ini dalam praktek, perlakuan hukum yang berbeda yang diterapkan pada perjanjian kredit Mikro adalah antara lain :

1. Perjanjian kredit mikro Kupedes dilakukan dengan akta perjanjian di bawah tangan, berbeda dengan perjanjian dalam kredit lainnya yang dibuat dengan akta perjanjian notariil ;
2. Jaminan dalam kredit makro Kupedes tidak terlalu besar, bahkan untuk penyaluran kredit dengan nilai 2 (dua) juta Rupiah dilaksanakan tanpa jaminan ;
3. Karakter debitur lebih diutamakan, dalam penilaian penyaluran kredit mikro Kupedes;
4. Prospek usaha dan kesehatan pembukuan dari usaha debitur dalam kredit mikro Kuepedes tidak terlalu diperhatikan, tetapi dalam kredit lainnya hal tersebut penting dalam pencairan kredit⁴.

Persoalan lainnya yang muncul dari perlakuan yang berbeda tersebut adalah pelaksanaan dalam praktek yang tidak terlalu menuntut besarnya jaminan yang diminta dan biasanya jaminan

⁴ Agus, Pelaksana Administrasi Bisnis Mikro BRI Cabang Kendal, prasurey 1 April 2005.

tanah, sertifikatnya tidak dibebankan dengan hak tanggungan, sehingga hilangnya hak kreditur terhadap benda jaminan.

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian oleh Debitur kepada Kreditur, di mana Debitur mengakui berhutang kepada Bank sejumlah/senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda maupun yang tidak termasuk bunga, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak.

Sebelum memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka bank dalam suatu perjanjian kredit mengikat nasabahnya dengan adanya jaminan, yang tidak lain untuk menjamin kepastian bahwa

hutang debitur akan dibayar yaitu dengan cara mengikat suatu benda milik debitur supaya kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat seperti yang diperjanjikan atau jika terjadi sebaliknya, maka hak pemenuhan dapat dilakukan dengan penjualan atau lelang benda-benda jaminan dan hasilnya digunakan untuk pemenuhan hutang debitur.

Pemberian kredit yang sehat diharapkan dapat menghasilkan tingkat pendapatan bunga pinjaman yang menguntungkan guna membiayai kegiatan operasional perbankan. Karena akhirnya suatu usaha perbankan dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat kesehatan portofolio kreditnya, pentingnya hal tersebut menjadi perhatian dalam perjanjian kredit mikro Kupedes menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian *"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Kupedes di Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Studi di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kendal)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit mikro Kupedes dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal dengan Debitur ?
2. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya jika debitur wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit mikro Kupedes dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal dengan Debitur.
2. Upaya yang dapat ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya jika debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum untuk

mengantisipasi timbulnya masalah dalam perjanjian kredit, serta berguna bagi :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dengan debitur.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam lingkup operasional Bank Rakyat Indonesia (BRI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵

Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas. Oleh karena itu banyak pendapat mengenai definisi perjanjian dari para sarjana, antara lain :

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶

⁵ Mariam Darus Badruzaman. 1996 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya. Alumni, Bandung, hal.23

⁶R.Setiawan, R. 1979. Pokok Pokok Hukum Perikatan. Alumni, Bandung, hal.49.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

2. Asas Perjanjian

Dalam bahasa Inggris asas adalah *principle*, asas dalam hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan ataupun peraturan

⁷ Disebutkan oleh penulis bahwa dalam *Hukum Perjanjian* yang sangat penting ditekankan adalah *adanya kata sepakat*. Hal tersebut harus diperhatikan mengingat guna mencegah/menghindari terjadinya salah paham diantara dua belah pihak. Lebih lanjut dapat dipelajari dalam Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Azas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung.

⁸ Abdul Kadir.Muhammad. 2000, *Hukum Perikatan*. Citra. Aditya Bakti, Jakarta, hal.34.

hukum, dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum⁹.

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, dalam suatu peraturan mungkin tidak menemukan pertimbangan etis, tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis, atau setidaknya dapat dirasakan adanya petunjuk kearah tersebut¹⁰.

Azas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

“Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

a. Asas Konsensualisme;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu¹¹

Secara umum, kalangan ilmunan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

⁹Rusli Effendy.dkk,1991. *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, ujung Pandang, hal. 28.

¹⁰ Satjipto Rahardjo dalam bukunya Rusli Effendy.dkk, *Teori Hukum*, Loc Cit.

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung,1994. Hal. 42.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.¹²

b. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹³

c. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak¹⁴.

d. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan¹⁵.

e. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ *Loc Cit.*

¹⁵ *Loc Cit.*

kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.¹⁶

f. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motifasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.¹⁷

g. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.¹⁸

h. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak

¹⁶*Ibid.* Hal. 43

¹⁷Mariam Darus Badruzaman *Loc. Cit.*

¹⁸*Ibid.* Hal. 44

hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁹

i. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁰

3. Syarat Sahnya suatu Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Adapun syarat subyektif meliputi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan yang kedua. Disebut syarat yang subyektif karena mengenai orangnya.

¹⁹ *Loc. Cit.*

²⁰ *Loc. Cit.*

Syarat-syarat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat disebut syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Unsur-unsur persetujuan adalah sebagai berikut :

- a. *Essentialia*
Bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b. *Naturalia*
Bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*
Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya²¹.

Pasal 1321 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, yang isinya:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, 1999, hal. 48.

4. Wanprestasi dalam Perjanjian

a. Pengertian Wanprestasi

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)²²

Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan²³.

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²⁴.

²² Purwahid Patrik, 1986. *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 3

²³ Munir Fuady. 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 137

²⁴ Subekti.1988, *Hukum Perjanjian*. Pradnya Paramita.Jakarta. hal. 45.

b. Akibat Wanprestasi

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dan waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*²⁵.

c. Upaya Hukum dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa:

- a. kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b. berakibat pembatalan perjanjian;
- c. peralihan risiko; dan
- d. membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan)²⁶.

²⁵*Ibid.* hal.77.

²⁶ *Ibid.* Hal. 78.

Dengan demikian, seseorang atau debitur yang dituduh lalai telah melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan cara:

- a) mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b) mengajukan bahwa kreditur sendiri yang memang lalai (ini disebut *exceptio non adimpleti contractus*);
- c) mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking* atau *waiver*)²⁷.

Kadang-kadang memang tidak selalu mudah menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi kalau dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang dimungkinkan berdasarkan "sistem terbuka" yang mengandung "asas kebebasan" yang dianut oleh hukum perjanjian. Jadi, pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau optional law (*aanvullend recht*)²⁸.

Meskipun kadang-kadang "waktunya" sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang mewajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan. Mengenai masalah "waktu" ini, salah satu pihak dianggap telah melanggar atau lalai melakukan prestasi apabila secara tegas batas waktu yang diberikan untuk melakukan prestasi telah dilampaui. Sebaliknya apabila tidak jelas atau tidak secara tegas dicantumkan kapan batas suatu prestasi harus dilakukan, akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari²⁹.

Selanjutnya dapat diikuti uraian berikut ini:

- a) Keadaan memaksa atau *overmacht*, yaitu keadaan yang berada di luar kekuasaan para pihak dapat dipergunakan untuk membela diri sehingga risiko atau tanggung jawab tidak dibebankan kepada yang bersangkutan.
- b) Wanprestasi yang terjadi adalah bukan pelaksanaan yang mengakhiri perjanjian, melainkan justru sebaliknya. Karena

²⁷ Loc Cit

²⁸ Ibid. Hal. 80.

²⁹ Ibid. hal. 81.

terjadi keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak dapat dihindarkan, perjanjian dengan persyaratan yang telah disepakati berakhir dengan kegagalan. Tidak terlaksanakannya perjanjian atau kontrak, berarti juga tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan pihak yang tidak melaksanakan perjanjian itu disebut telah melakukan wanprestasi³⁰.

B. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata:

“Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku.

Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”³¹.

³⁰*Ibid.* Hal. 82.

³¹Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal.31.

Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi Klausul).

Kredit berasal dari bahasa romawi "*credere*" yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

- sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan³².

Menurut Drs. O.R Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman , Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan - balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi

³² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1989*, hlm. 21.

pembahasan. Kredit bertungsi koperatif antara Si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang³³.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan :

"Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Pasal 1250 KUHPerdara :

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus".

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

³³Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hal. 95

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut jenisnya bank terdiri dari:

1. Bank Umum, dan
2. Bank Perkreditan Rakyat³⁴.

Salah satu kegiatan dalam usaha perbankan yang paling umum adalah penyaluran kredit, dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut :

(1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur dan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian³⁵.

(2) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan³⁶.

³⁴C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*. Pradnya Paramita. hal. 586.

³⁵ Merguerite S.Robinson.2004, *The Micro Finance Revolution- Revolusi Keuangan Mikro*, Salemba Empat.Jakarta.hal.388.

³⁶ Loc Cit.

(3) Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur

(a) *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya.

(b) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

(c) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

(d) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

(e) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit³⁷.

(4) Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur :

(a) *Party* (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pihak harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

(b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan.

³⁷*Ibid*, hal. 389.

- (c) *Payment* (Pembayaran)
Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali.
 - (d) *Profitability* (Perolehan Laba)
Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kredit harus dapat berantisipasi, apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya.
 - (e) *Protection* (perlindungan)
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan³⁸.
- (5) Prinsip 3 R
Terdiri dari unsur-unsur :
- (a) *Returns* (Hasil yang diperoleh)
Returns, Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
 - (b) *Repayment* (Pembayaran kembali)
Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
 - (c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan

³⁸ Loc Cit.

apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut³⁹.

C. Penyaluran Kredit oleh Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia sejak seabad yang lalu telah dikenal masyarakat sebagai bank-nya *wong cilik*. Kedekatannya dengan masyarakat pedesaan juga menjadi trade mark tersendiri dalam dunia perbankan nasional.

Namun seiring dengan globalisasi zaman, maka BRI pun juga merambah bisnis perbankan dalam era modern. Selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi turut membuat kompetisi bank makin ketat. Jenis pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat harus mampu menarik dan bersaing dengan produk pinjaman dari bank lain.

Produk yang menarik dan mempunyai daya jual yang menguntungkan pasti akan direspon dan diminati masyarakat. Dalam peta persaingan perbankan yang ketat, maka BRI menawarkan produk pinjaman yang mempunyai 4 (empat) segmen yang terbagi :

1. Pinjaman Mikro : disalurkan melalui BRI Unit yang tersebar hampir diseluruh kecamatan, dengan plafond kredit sampai Rp 50 juta. Kredit jenis ini dalam pemasarannya dikenal dengan nama *kupedes*.

³⁹*Ibid.* hal.415.

2. Pinjaman Program : merupakan jenis kredit yang bersifat khusus, karena pembiayaannya didukung Pemerintah guna membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi lemah. Peran Pemerintah terutama adalah dalam penyediaan dana likuiditas guna penyaluran kredit yang banyak bersifat membantu masyarakat strata golongan ekonomi lemah.
3. Pinjaman Komersial : adalah segmen kredit untuk para pengusaha dan wirausaha sektor perdagangan dan industri yang mempunyai plafond Rp 50 juta hingga Rp 25 milyar, dengan tingkat suku bunga komersial.
4. Pinjaman Menengah : merupakan jenis kredit korporasi bagi pengusaha besar yang mempunyai plafond di atas Rp 25 milyar, dengan tingkat suku bunga komersial dan skala bisnis yang bersifat makro⁴⁰.

Dalam analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak BRI, setiap proses kredit yang ada senantiasa mengkedepankan aspek kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan acuan dari Bank Indonesia, guna menghindarkan terjadinya kredit bermasalah.

Prosedur dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh setiap BRI Unit mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat BRI, sehingga aspek legalitas secara hukum harus terjaga demi kepentingan BRI pada kemudian hari.

⁴⁰ Pembagian segmen kredit pada tiap bank berbeda dan kebijakan tersebut merupakan kebijakan setiap bank yang mengacu pada ketentuan standard kolektibilitas kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Sistem dan prosedur perkreditan di BRI dituangkan dalam suatu Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) yang disusun dan dikelola oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI dan direvisi sesuai perkembangan makro ekonomi yang ada.

D. Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI unit (bukan oleh Kantor Cabang BRI atau Bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak.

Sasaran Kupedes

1. Perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (eligible)
2. Golongan masyarakat berpenghasilan tetap misalkan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat I d ke bawah dan bukan pejabat, Polisi, Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan I ke bawah dan bukan pejabat pegawai perusahaan daerah pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap, dan lain-lain⁴¹.

Jenis Kupedes

1. Kupedes Modal Kerja .
2. Kupedes Investasi⁴².

Sektor yang dibiayai Kupedes

1. Sektor Pertanian.
2. Sektor Perindustrian.
3. Sektor Perdagangan.
4. Jasa lainnya.
5. Golongan berpenghasilan tetap⁴³.

⁴¹Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁴² Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁴³Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Kupedes

1. Plafond Kupedes minimal Rp 25.000,- dan maksimum Rp. 50.000.000,
2. Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 50. 000.000,-⁴⁴.

Jangka Waktu dan Pola Angsuran

1. Jangka waktu angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan.
2. Untuk Kupedes modal Kerja dan Investasi 36 bulan. Pola angsuran;
 - a. Angsuran secara bulanan.
 - b. Angsuran secara bulanan dengan *grace period* angsuran 3,4,6 bulan⁴⁵.

Keistimewaan Kupedes

Diberikan IPTW (Insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu $\frac{1}{4}$ bagian dari suku bunga.

Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya harus cukup mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga)⁴⁶.

⁴⁴Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁴⁵ Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁴⁶ Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

E. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdato maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139 - 1149 KUHPerdata (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150 - 1160 KUHPerdato (tentang gadai), Pasal 1820-1850 KUHPerdato (penanggungan utang), Hak Tanggungan maupun Fidusia. Tanggungan atas perikatan seseorang disebut jaminan secara umum, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdato diletakkan asas umum hak seseorang kreditur terhadap debiturnya, dalam mana ditentukan bahwa; segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan seseorang⁴⁷.

⁴⁷Yunanto, 2000, *Aspek-aspek Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.6.

Pengaturan jaminan sekarang ini masih bersifat sektoral yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, diantaranya jaminan yang diatur di luar Buku II KUHPerdara adalah ;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan.

Buku III KUHPerdara Tentang Penanggungan;

Pasal 314 KUHD mengenai Hipotik Kapal;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang, Perumahan dan Pemukiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Fidusia.

2. Kreditur Konkuren dan Preferent

Di dalam Pasal 1131 KUHPerdara diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya, dalam mana ditentukan bahwa : segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

1. Semua barang-barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat.
2. Semua barang yang akan ada, di sini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya.
3. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak⁴⁸.

Ini berarti bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.

Dari ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata tersebut dapat disimpulkan :

1. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
3. Hak tagihan kreditur, hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan person debitur (kecuali lembaga sandera dihidupkan).

⁴⁸ *Loc Cit.*

Jaminan seperti itu diberikan kepada setiap kreditur dan karenanya disebut jaminan umum.

Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan : kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkannya kepadanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari pasal ini tersimpul adanya persamaan hak, persamaan kedudukan para kreditur terhadap seorang debitur, tidak ada yang diistimewakan, sekalipun di antara mereka mungkin ada mempunyai tagihan yang lebih tua, lebih dulu. Jadi semua kreditur dalam pemenuhan tagihannya mempunyai kedudukan yang sama.

Umur atau lahirnya hak tagihan lebih dahulu, pada dasarnya tidak memberikan kedudukan yang lebih baik pada kreditur yang bersangkutan. Kemudian, atas hasil penjualan harta benda debitur, para kreditur mendapat bagian yang seimbang dengan besar kecilnya tagihan mereka terhadap keseluruhan tagihan kreditur.

Hak pemenuhan dari para kreditur yang demikian itu adalah sama dan sederajat satu dengan lainnya, tak ada yang lebih diutamakan.

Mereka mempunyai hak bersama sama terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat tersebut disebut Kreditur Konkuren.

Sedangkan seluruh harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan bagi semua kreditur tersebut merupakan Jaminan Umum. Jaminan umum demikian adanya diberikan oleh undang undang, jadi tidak diperjanjikan.

Sedangkan hak untuk didahulukan dalam pemenuhan hutang, dan, karenanya krediturnya disebut Kreditur Preferent, timbul karena dua jalan :

1. Karena memang sengaja diperjanjikan lebih dahulu bahwa piutang piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya dari pada piutang piutang yang lain (mengenai asas prioritait), seperti : gadai, hak tanggungan dan fiducia.
2. Kemungkinan untuk pemenuhan yang didahulukan itu timbul karena memang telah ditentukan undang-undang, yaitu bagi para pemegang hak privilege, ialah kreditur pemegang piutang piutang tertentu yang oleh undang-undang ditentukan lebih diutamakan dari kreditur kreditur lain semata mata sesuai dengan sifat perutangannya⁴⁹.

⁴⁹ Ibid. hal.7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.⁵⁰

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.

⁵¹ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal. 4.

pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran⁵².

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.⁵³

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36.

⁵³ *Ibid.* hal. 9.

yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁴

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara Kreditur/bank dengan Debitur/konsumen.

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hal. 10.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dari pelaksanaan perjanjian kredit antara Kreditur/Bank dengan Debitur/konsumen beserta hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip penyaluran kredit mikro guna menjamin keamanan Kreditur (Bank BRI Cabang Kendal).

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama⁵⁵. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁵⁶.

Berdasarkan judul penelitian maka populasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penyaluran kredit mikro kupedes di Bank Rakyat Indonsia Kantor Cabang Kendal, maka penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kendal;

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 119.

2. Debitur/masyarakat dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kendal yang melakukan tindakan wanprestasi.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non Random sampling* dengan *Purposive Sampling*, baik dalam menentukan sampel Kreditur/Bank dan Debitur/masyarakat, sampel Kreditur/Bank ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, sampel Debitur/masyarakat ditentukan hanya Debitur/masyarakat yang mengalami tindakan wanprestasi.

Responden masing-masing telah ditentukan :

1. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kendal
2. Staf Hukum Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kendal 2 (dua) orang;
3. Debitur/masyarakat 2 (dua) orang;

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik *interview*/wawancara langsung dengan responden.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis

menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti⁵⁷.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁵⁷ H.B. Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. Hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia

BRI, bank tertua di Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada tanggal 16 Desember 1995. BRI modern adalah hasil perkembangan dari beberapa bank yang bermula dari Bank Priyayi Purwokerto (Bank Pendukung dan Simpanan untuk Pegawai Pemerintah Domestik, atau *Hulp-en Spaar Bank der Indlandsche Bestuurs Ambtenaren*), yang dibuka di Jawa di tahun 1895 dan dianggap sebagai cikal bakal perbankan pedesaan Indonesia. Priyayi artinya bangsawan atau kelas elit. Bank ini didirikan oleh Raden Wiriamadaya, seorang pejabat pemerintah Jawa dari keluarga priyayi yang "ingin membantu kawan-kawannya lepas dari utang", Wiriamadaya menyadari bahwa saat selamatan, tuan rumah yang mengadakan acara telah mengambil pinjaman yang sangat besar dari seorang pemberi pinjaman Cina supaya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya. Wiriamadaya sangat tertekan oleh keadaan ini dan memutuskan untuk menyumbang acara-acara selamatan dari kantongnya sendiri dan mengusulkan untuk membuat dana simpanan untuk warga-warga Indonesia yang berpengaruh. Sieburgh, seorang administrator kolonial Belanda yang memimpin Kabupaten Purwokerto, mendukung Wiriamadaya dalam usahanya⁵⁸.

Di tahun 1897, De Wolff van Westerrode, pengganti Sieburgh dan seorang pengagum dari bank koperasi Raiffeisen yang didirikan di Jerman di tahun 1850-an oleh Friedrich W. Raiffeisen, mulai mengorganisir ulang bank ke dalam bentuk koperasi. Tahun berikutnya, van Westerrode ditunjuk sebagai direktur bank, yang diganti namanya menjadi Poerwokertosche Hulp, Spaar, en Landbouwcrediet Bank. Pendekatan koperasi ini, yang mendapatkan dukungan di bawah "Kebijakan Etis Baru (*New*

⁵⁸ Merguerite S. Robinson. 2004, *The Micro Finance Revolution- Revolusi Keuangan Mikro*, salemba Empat. Hal. 219.

Ethical Policy)" dari Ratu Nilhelmina Belanda, berorientasi kepada kesejahteraan kalangan yang berada di bawah pemerintahan kolonial, yang secara umum mengambil model gerakan lembaga perkreditan (*credit union*) yang berawal di Eropa di tahun 1850-an⁵⁹.

Tujuan Van Westerrode adalah untuk menciptakan sebuah lembaga sentral, sebuah bank kredit populer, untuk koperasi kredit pedesaan di Purwokerto. Walaupun tujuannya adalah untuk membangun sebuah bank koperasi, bank ini juga menyediakan pelayanan kepada mereka yang bukan anggota dan tidak memegang prinsip-prinsip koperasi secara kaku. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Schmit (1991), praktik peminjaman uang masyarakat Cina di Indonesia, dan juga praktik masyarakat Arab dalam skala yang lebih kecil, merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi administrasi kolonial Belanda karena peminjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi diidentifikasi sebagai penyebab utama merosotnya masyarakat pedesaan di dalam koloni, dan oleh karena itu menyebabkan ketidakstabilan masyarakat kolonial.

Bank Perkreditan Rakyat yang lain mulai muncul di Jawa, dan subsidi dari pemerintah makin bertambah. Oleh karena itu, mulai terjadi proses di mana bank-bank yang populer berada di

⁵⁹ *Loc Cit.*

bawah kendali pemerintah daerah kemudian dikenal sebagai *Volksbank* (Bank Rakyat) dan seiring dengan waktu dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Di tahun 1912, sebuah pelayanan kesejahteraan mandiri, *Volkscredietwezen* (Sistem Kredit Populer), didirikan di Indonesia. Sebuah Dana Sentral (Centrale Kas) juga dibentuk, dengan modal kerja sebesar 5 juta gulden. Sistem Kredit Populer dan Dana Sentral ditujukan untuk mengendalikan, mendukung, dan mengawasi 75 bank kredit populer, 1242 lumbung padi, dan 1.336 batik pedesaan yang telah muncul. Diasumsikan bahwa "penduduk pedesaan memiliki "kehausan kronis akan kredit" dan terlalu miskin untuk menabung. Akan tetapi di tahun 1926 simpanan domestik mencakup 66 persen dari total simpanan bank-bank kabupaten di Jawa dan Madura.

Pada akhir tahun 1920 an pekerjaan Boeke dengan *Volkscredietwezen* berakhir, dan Fruin yang kemudian menjadi Direktur. Di tahun 1930 Fruin mengusulkan pendirian *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) sebagai sebuah bank yang menggabungkan keahlian keuangan dan sosial, sehingga menjadi lembaga kredit yang memiliki tanggung jawab sosial. AVB didirikan dengan keputusan kerajaan (Belanda) di tahun 1934, dan Fruin ditunjuk sebagai pimpinan⁶⁰.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 221.

Di tahun 1946, segera setelah kemerdekaan Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi BRI, BRI lalu bergabung dengan AVB di tahun 1950, membentuk bank komersial milik negara.

Lima bank komersial Indonesia masing-masing memiliki tanggung jawab khusus: mandat BRI adalah untuk memberikan layanan perbankan ke daerah-daerah pedesaan, dengan prioritas terhadap pertanian dan usaha-usaha lokal. Di tahun-tahun berikutnya setelah penggabungan pada tahun 1950, BRI menjadi bank terbesar di Indonesia dilihat dari jumlah cabang dan nasabah, dan juga terbesar dilihat dari jumlah aktivitya⁶¹.

2. Kredit Mikro Kupedes

Kupedes memberikan pinjaman perorangan untuk golongan miskin dan menengah ke bawah yang aktif secara ekonomi di seluruh Indonesia⁶².

Peminjam Kupedes dipilih oleh BRI tanpa campur tangan luar, dan bank menanggung risiko kredit sepenuhnya.

⁶¹ *Loc Cit.*

⁶² Wawancara dengan Pimpinan BRI Cabang Kendal, tanggal 12 Juli 2005.

Keputusan pinjaman, dibuat oleh staf BRI Unit yang terlatih baik dan berpengalaman yang disebut Mantri, berdasarkan hasil evaluasi karakter tiap peminjam (kemauan untuk membayar kembali); kelayakan usaha, dan aliran kas usahanya (kemampuan untuk membayar). Kupedes dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para peminjam, berpenghasilan rendah dengan prosedur pinjaman yang sederhana, proses yang cepat, dan persyaratan yang fleksibel⁶³.

Dalam keseluruhan peraturannya, jadwal jatuh tempo dan pembayaran kembali pinjaman Kupedes disesuaikan dengan kebutuhan tiap peminjam. Para peminjam yang membayar pinjamannya tepat waktu diperbolehkan untuk meminjam kembali dengan jumlah pinjaman yang berangsur-angsur semakin besar, sampai batas maksimum Kupedes.

Bank tidak diwajibkan melatih suatu keterampilan tertentu kepada para peminjam Kupedes atau berusaha memantau usaha atau penggunaan pinjaman mereka.

⁶³ Hutasoit, Staff Hukum BRI Cabang Kendal, wawancara tanggal 14 Juli 2005.

Dianggap bahwa para peminjam lebih memahami usahanya daripada staf bank⁶⁴.

Sejak tahun 1984 tiap BRI Unit diperlakukan sebagai unit keuangan atau "pusat keuntungan (*profit center*) dengan neraca dan laporan laba ruginya sendiri" sebuah perubahan yang penting untuk implementasi efektif Kupedes dan program simpanan baru (Simpedes).

Keberhasilan program Kupedes dapat dilihat dari Tingkat pembayaran pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan antara lain:

- a. Para peminjam dipilih dengan hati-hati berdasarkan kemampuan mereka untuk menggunakan pinjaman secara produktif dan kemampuan serta kemauan mereka untuk membayar kembali.
- b. Pinjaman diberikan dalam jumlah yang berangsur-angsur meningkat berdasarkan catatan pembayaran peminjam dan kelayakan kredit usahanya.
- c. Para peminjam ingin membayar kembali supaya opsi mereka untuk meminjam kembali tetap terbuka dengan persyaratan yang dianggap ringan dan biaya yang terjangkau akal.

⁶⁴ Andre, Debitur Kredit Mikro Kupedes, wawancara tanggal 13 Juli 2005.

- d. Staf BRI Unit memperlakukan nasabah mereka dengan hormat dan penuh sopan santun.

3. Perjanjian Kredit Mikro dalam Praktek

Aspek karakter menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya penyelesaian dalam kredit bermasalah yang ada, mengingat perbankan cenderung menginginkan segera adanya pembayaran kembali (*repnymen*) dari dana yang telah dikucurkan kepada nasabah guna mengurangi beban kerugian yang timbul⁶⁵.

Pinjaman bermasalah lebih baik dirundingkan dengan debitur untuk mencari solusi, terdapat data yang menggambarkan jika umur pinjaman bermasalah relatif baru (kurang dari 3 bulan) lebih gampang untuk mengadakan solusi penyelesaiannya daripada pinjaman bermasalah yang berumur lebih lama.

Hal tersebut tidak terlepas dari sikap dan komitmen debitur dalam menghormati perjanjian kredit yang ada. Unsur itikad baik debitur sangat dominan dalam penanganan pinjaman bermasalah.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, sebenarnya pihak BRI telah berupaya dengan menerapkan prinsip *prudential banking*,

⁶⁵ Iwan P. Staf BRI Cabang Kendal, wawancara tanggal 8 Juli 2005.

yaitu pemberian kredit dengan berasas kehati-hatian, disamping memperhatikan nilai dan potensi serta kelayakan usaha yang wajar terhadap bisnis milik debitur⁶⁶.

Dalam proses awal pihak BRI akan menganalisa aspek 5 C yang merupakan standard perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu perangkat lain adalah meneliti dalam daftar kredit macet Bank Indonesia yang datanya dilakukan secara on line dengan pihak Bank Indonesia berdasarkan nomor NPWP pihak calon debitur.

Setelah serangkaian proses penelitian di lapangan yang dilakukan oleh petugas analis kredit atau *Account Officer* (Mantri), maka laporan penilaian yang dikaji dapat merekomendasikan tentang fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada seorang debitur.

4. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kredit

Mikro Kupedes

Selama ini kebijakan kredit mikro Kupedes diberikan kepada pegawai negeri dengan golongan kecil dan pengusaha kecil, sehingga besarnya penyaluran kredit juga kecil, umumnya kisaran jumlah kredit adalah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000

⁶⁶Hutasoit, Staff Hukum BRI Cabang Kendal, wawancara tanggal 14 Juli 2005.

(Lima juta rupiah), walaupun ada juga permohonannya yang diterima sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) ke atas.

Permasalahan wanprestasi dalam kredit mikro Kupedes, bukanlah hal baru, sering terjadi keterlambatan membayar angsuran, terutama pada saat gagal panen, atau pada saat masyarakat desa atau pegawai negeri memiliki beban biaya tambahan pada masa-masa hari raya besar keagamaan atau pada masa permulaan sekolah anak-anak.

Keterlambatan ini biasanya meliputi waktu satu sampai dua bulan saja, sering kondisi ini disebabkan masyarakat kecil kurang pandai menginvestasikan pinjaman modal Kupedesnya terhadap hal-hal yang tidak produktif, seperti membeli perlengkapan rumah tangga misalnya kulkas, tv, kompor gas dan lain-lain.

BRI menyadari bahwa bahwa sasaran dari kredit mikro Kupedes adalah masyarakat dengan penghasilan rendah, atau terhadap pegawai dengan golongan kecil, sehingga untuk meminimalisasi dalam hal terjadinya wanprestasi berupa keterlambatan membayar BRI memberikan toleransi berupa kebijakan mundurnya tanggal pembayaran 14 (empat belas) hari dari tanggal peminjaman, sehingga apabila dana kredit cair tanggal 10 bulan

berjalan maka bulan depan harus dibayar paling lambat tanggal 24 bulan berjalan⁶⁷.

Selain memberikan tenggang waktu yang mundur, BRI juga memberikan bonus lunas satu kali pembayaran angsuran apabila debitur telah melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa ada tunggakan (tepat waktu), terus sampai masa pembayaran selesai, kebijakan ini dimaksudkan supaya debitur tergerak/terpacu untuk menyelesaikan pembayaran angsurannya tepat waktu.

Apabila pada tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak juga terjadi pembayaran angsuran, maka debitur secara langsung kehilangan kesempatan mendapatkan bonus gratis satu kali pembayaran angsuran, selain ganjaran tersebut debitur juga mendapat predikat tidak baik dalam administrasi perbankan BRI, yang nantinya data ini akan menjadi rujukan dalam pemberian kredit selanjutnya baik berupa pengabulan permohonan pinjaman maupun peningkatan besar pinjaman.

Pada tahapan tindakan wanprestasi yang lebih berat berupa tidak terbayarnya angsuran bulan berikutnya atau total menunggak

⁶⁷ Kesimpulan wawancara dengan Debitur dan Staf BRI Cabang Kendal, dari tanggal 5 sampai 16 Juli 2005.

dua bulan, maka BRI akan menempuh cara koordinasi berupa tindakan pemberitahuan terjadinya tunggakan yang dirangkaikan dengan tindakan penagihan, namun tindakan penagihan ini hanya berupa permintaan pernyataan kapan debitur akan menyelesaikan tunggakannya, upaya ini dilakukan terus menerus dalam tenggang waktu yang pendek, guna memberikan kesan bahwa debitur dikejar/didesak penyelesaian pembayaran angsuran secepatnya/sesegera mungkin.

Selama ini cara-cara tersebut efektif, karena pada umumnya debitur merupakan debitur kelas menengah kebawah yang punya toleransi pergaulan dalam lingkungan sosial yang dekat dengan masyarakat lainnya sehingga terbentuk budaya malu yang kental terhadap tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Apabila tetap tidak terjadi penyelesaian pembayaran angsuran, BRI melalui kebijakan kredit mikro Kupedes tidak dapat berbuat banyak selain terus menempuh jalur negosiasi. Negosiasi dapat berupa penentuan kapan pembayaran angsuran akan dilakukan atau bila debitur berkeinginan menjual jaminannya (biasanya berupa tanah), maka BRI akan pro aktif mencari pembelinya (selama ini jaminan sertifikat berada di tangan BRI tanpa adanya pembuatan Akta

Pembebanan Hak Tanggungan), sehingga BRI memiliki kesempatan menjual jaminan dan menghitung biaya pemotongan pinjaman debitur dari hasil penjualan tersebut.

Penjualan jaminan seperti yang dimaksud di atas merupakan penjualan jaminan dimana BRI dan debitur sama-sama mencari pembeli dari objek jaminan yang ditahan surat-suratnya/dokumennya oleh BRI, setelah ada pembeli, jual beli dilangsungkan dengan disaksikan oleh BRI, perlu diingat bahwa BRI tidak berperan sebagai penjual, meskipun objek tersebut merupakan jaminan atas kredit macet.

Setelah jual beli selesai/terlaksana, BRI dan debitur melakukan perhitungan atas sisa angsuran atau kewajiban lainnya dari debitur yang harus dilunasi. Biasanya cara-cara ini ditempuh dikarenakan nilai pinjaman kredit mikro kupedesnya tergolong kecil (Rp.5.000.000.- lima juta kebawah) dan objek tidak dibebankan Hak Tanggungan.

B. Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan perjanjian kredit mikro Kupedes dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal dengan Debitur.

Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan pengertian perjanjian adalah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 KUHPdata tersebut mengandung kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangan dimana setidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian pembuatan termasuk juga tindakan :

- a. mengurus kepentingan orang lain.
- b. Perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdato mengatur mengenai sahnya perjanjian, yaitu :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian dapat disebut syarat subyektif.

Syarat-syarat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat disebut syarat obyektif.

Apabila syarat subyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), dan apabila syarat obyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Pasal 1321 KUHPerdato memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau

penipuan, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian kredit yang dimaksud merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUHPerdara. Kredit berasal dari bahasa romawi "*credere*" yang berarti percaya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998

Tentang Perbankan :

Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara konkrit dalam kredit mikro Kupedes, unsur-unsur kredit tersebut menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dapat ditegaskan sebagai berikut:

- a. Dalam suatu kredit mikro kupedes harus nampak adanya kesepakatan yang tertuang dalam bentuk suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, perjanjian tersebut merupakan perjanjian

kredit sesuai sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pihak, untuk mewujudkan keinginan mereka.

- b. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes harus nampak jelas adanya para pihak, yaitu pihak "kreditur" sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau dalam hal ini BRI Cabang Kendal, dan pihak debitur atau masyarakat yang merupakan sasaran dari fasilitas program kredit mikro kupedes.
- c. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes kreditur (BRI unit) harus memiliki landasan kepercayaan terhadap pihak debitur akan kemauan dan kemampuannya dalam membayar cicilan kreditnya, biasanya kepercayaan kreditur (BRI unit) akan kemampuan debitur ini diperoleh pada survey sebelum terjadinya pencairan kredit.
- d. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes, kreditur harus yakin adanya kesanggupan membayar hutang dari pihak debitur, kesanggupan ini juga merupakan suatu keyakinan yang muncul dalam diri kreditur pada saat survey, keyakinan ini didasarkan pada kriteria dan klasifikasi usaha yang ditekuni oleh debitur pada saat mengajukan permohonan kredit, klasifikasi usaha debitur ini

dikaji berdasarkan kondisi perekonomian dan kecenderungan trend usaha yang ditekuni serta prospeknya kedepan.

- e. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes secara konkrit diteruskan dengan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak kreditur (BRI unit) kepada pihak debitur.
- f. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes harus jelas mekanisme atau prosedur pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan kejelasan imbalan/bunga atau pembagian keuntungan yang akan diberikan kepada BRI unit pelaksana kredit mikro kupedes tersebut.
- g. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes secara tegas juga harus diperjanjikan adanya tenggang waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Dalam perjanjian kredit mikro kupedes, kreditur harus memahami resiko yang diakibatkan tenggang waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Kredit Mikro kupedes sebagai salah satu bentuk program perkreditan yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, haruslah diberikan oleh bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan yang dilakukan oleh bank menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dapat dibedakan ke dalam :

- (1) Kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan
- (2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut :

- (1) Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
- (2) Menyalurkan dana lewat pemberian kredit
- (3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- (4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :

- (a) Surat-surat wesel

- (b) Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya.
 - (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - (e) Obligasi.
 - (f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - (g) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- (2) Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
- (3) Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen lainnya.
- (4) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- (5) Menyediakan tempat (*safe deposit box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- (6) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).

- (7) Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.
- (8) Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dapat dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- (9) Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- (10) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
- (11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain).

Disamping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :

- (1) Melakukan kegiatan valuta asing.
- (2) Melakukan penyertaan modal pada Bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- (3) Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
- (4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata,

Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam halnya peminjaman uang, besaran utang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, artinya besaran utang adalah sama dengan besaran jumlah sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata-uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, BRI Unit penyalur kredit mikro kupèdes harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada kenyataannya perjanjian kredit seringkali dibuat dalam suatu perjanjian baku, yaitu Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, dari hasil penelitian penulis perjanjian baku juga terjadi dalam perjanjian kredit mikro kupedes, pembakuan ini bukan pada formulir perjanjian tetapi terhadap klausul-klausulnya.

Perjanjian kredit dalam kredit mikro kupedes memiliki fungsi :

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit mikro kupedes merupakan sesuatu perjanjian yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, namun dalam konteks ini perlu dicermati aturan-aturan lain yang mengikuti lembaga jaminan yang digunakan, misalnya Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan terhadap benda tetap atau tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap benda bergerak, yang ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro kupedes, rambu-rambu menyangkut lembaga jaminan yang ada tidak digunakan, misalnya jaminan sertifikat debitur diambil namun tidak dibebankan Hak

Tanggungan, karena tindakan ini BRI unit pelaksanan Kredit mikro kupedes tidak menjadi kreditur preferent.

2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur (BRI Unit pelaksana) dan debitur, batasan ini menyangkut jumlah pinjaman yang diterima oleh debitur dan kewajiban membayar pokok maupun bunga sebagai variabel dalam angsuran yang merupakan hak kreditur (BRI unit pelaksanaan kredit mikro kupedes).
3. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Adapun isi perjanjian kredit, pada pokoknya adalah :

- a. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
- b. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya. Kecuali pembayaran bunga, biaya administrasi, provisi dan denda (jika ada) harus dibayar lebih dahulu oleh debitur. Denda hanya dibebankan apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran kredit.
- c. Jangka waktu pembayaran kredit. Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit, yaitu

pembayaran lunas sekaligus pada akhir jangka waktu kredit. Bahkan pembayaran lunas sebelum berakhir jangka waktu kredit dibolehkan, asalkan meliputi seluruh jumlah hutang, termasuk bunga, denda (jika ada), dan biaya-biaya.

- d. Cara pembayaran kredit. Pembayaran dilakukan di Kantor BRI Unit pelaksana pada hari dan jam kantor (hari kerja) yang telah ditetapkan. Pembayaran dengan media surat berharga atau uang tunai, dan dicatat dalam rekening debitur dan pembukuan bank yang bersangkutan.
- e. Klausula jatuh tempo (*opeisbaar*). Klausula ini memuat ketentuan pembayaran sekaligus dan seketika, hilangnya kewenangan bertindak atau hilangnya hak debitur untuk mengurus kekayaannya dan barang jaminan pada bank, serta kelalaian debitur memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
- f. Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan.
- g. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.

- h. Biaya akta dan penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh debitur.

Pemberian kredit kepada debitur, mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis yaitu perjanjian kredit, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dalam penyaluran kredit mikro kupedes kisaran kredit 3 juta sampai 50 juta; sering pemberian kreditnya tidak dengan analisis yang teliti mengenai kelayakan usaha dari calon debitur, kondisi ini lambat laun telah "diadopsi" menjadi "kebijakan" dalam penyaluran kredit mikro, kebijakan yang tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat ini terbentuk dikarenakan tujuan, sasaran dan peruntukan kredit mikro kupedes sangat spesifik, yaitu terhadap usaha-usaha kecil, atau pegawai dengan golongan bawah, yang pada kenyataannya tidak mengerti banyak mengenai sistem pembukuan moderen dan pengelolaan usaha yang baik. Sehingga bila klasifikasi penyaluran

kredit yang sehat diterapkan maka sasaran penyaluran kredit mikro kupedes untuk menguatkan ekonomi masyarakat kecil tidak akan terlaksana, menurut penulis penyaluran kredit mikro kupedes tidak lepas dari kebijakan Bank Rakyat Indonesia untuk menjadi bank pionir yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat kecil mengenai pengelolaan keuangan yang baik.

Pelaksanaan kredit mikro kupedes tidak lepas dari berbagai pertimbangan-pertimbangan, yang garis besarnya ditekankan dalam prinsip-prinsip di bawah ini :

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur dan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya di berlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan.

3. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur

a. *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

c. *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan

mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

e. *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Dalam kredit mikro kupedes biasanya agunan hanya di pegang saja dokumennya tanpa dilanjutkan dengan pembebanan jaminan, misalnya agunan berupa tanah, sertifikatnya dipegang tetapi tidak dibebankan dengan hak tanggungan, dengan pertimbangan bahwa pinjaman kredit yang disalurkan pada umumnya berjumlah kecil (di bawah Rp.5.000.000.- lima juta rupiah) sehingga tidak efektif dan efisien untuk dibebankan dengan hak tanggungan.

4. Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur :

(1) *Party* (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pihak harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

(2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan.

(3) *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali.

(4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kredit harus dapat berantisipasi, apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya.

(5) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

5. Prinsip 3 R

Terdiri dari unsur-unsur :

(1) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Returns, Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar

keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

(2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

(3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Pada dasarnya peruntukan kredit mikro kupedes sasarannya ditujukan bagi :

1. Perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (*eligible*).
2. Golongan masyarakat berpenghasilan tetap misalkan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat I d ke bawah dan

bukan pejabat, Polisi, Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan I ke bawah dan bukan pejabat pegawai perusahaan daerah pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap, dll⁶⁸.

Dengan perhatian pada sektor :

1. Sektor Pertanian.
2. Sektor Perindustrian.
3. Sektor Perdagangan.
4. Jasa lainnya.
5. Golongan berpenghasilan tetap⁶⁹.

Dengan besaran kredit :

1. Plafond Kupedes minimal Rp 25.000,- dan maksimum Rp. 50.000.000,
2. Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 50. 000.000,-⁷⁰.

Oleh karena itu umumnya penyaluran kredit mikro kupedes diperuntukkan bagi pengusaha menengah kebawah yang membutuhkan modal kerja kecil. Dengan kondisi demikian BRI menerapkan kebijakan pelaksanaan kredit yang sangat sederhana dalam kredit mikro kupedes, yang dimulai dari :

1. Adanya permohonan kredit debitur, yang dalam permohonan tersebut mencantumkan identitas lengkap, alamat, jenis usaha

⁶⁸Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁶⁹Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

⁷⁰Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.

yang akan dikembangkan jumlah yang dimohonkan dan jangka waktu pembayaran, serta jaminan yang ada.

2. Permohonan kredit tersebut akan diteliti dan dianalisa oleh analisis kredit mikro pada BRI Unit penyalur, hasil analisa akan ditindak lanjuti dengan kegiatan survey di lapangan, kegiatan survey ini meliputi observasi rumah pemohon (debitur) dan kebenaran usaha pemohon serta kebenaran jaminan pemohon, termasuk *cross check* kebenaran dokumen yang ada.
3. Hasil analisis lapangan akan diberikan disposisi untuk ditindaklanjuti, analisis lapangan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah kredit yang disetujui.
4. Persetujuan penyaluran kredit akan disampaikan kepada pemohon yang sekaligus merupakan pemanggilan kepada pemohon untuk menandatangani perjanjian kredit dan mencairkan pinjamannya yang disetujui, perjanjian kredit berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan bukan pada tanggal persetujuan maupun pencairan, kalau perjanjian disetujui tetapi pemohon belum menandatangani perjanjian maka bank belum memiliki hak tagih atas debitur pada tanggal tersebut, demikian juga pada saat debitur menandatangani perjanjian namun belum mencairkan

dananya, maka tanggal yang digunakan adalah tanggal penandatanganan dan bukan tanggal pencairan, hal ini penting untuk memberikan dasar tanggal berapa bulan berikut angsuran harus dibayar oleh debitur.

Ada beberapa hal dalam penyaluran kredit mikro yang menyimpan konflik dikemudian hari, antara lain tidak cermatnya analisis terhadap usaha debitur serta kondisi pembukuan debitur sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi data oleh debitur menyangkut usahanya dan prospek usahanya, walaupun memang pada umumnya kredit mikro kupedes disalurkan dalam jumlah yang kecil, tetapi dalam kurun waktu yang panjang program ini dengan kelalaian demikian dapat memungkinkan terjadinya kredit macet yang tidak kecil.

Hal lainnya adalah dikarenakan jumlah kredit mikro kupedes yang diberikan kecil maka sering penyaluran kredit tidak terlalu memperhatikan eksistensi lembaga jaminan yang digunakan, misalkan dengan jaminan sertipikat, BRI unit pelaksanaan kupedes tidak melanjutkan dengan pembebanan hak tanggungan terhadap sertipikat tersebut sehingga status kreditur adalah bukan kreditur preferent.

2. Analisis Upaya yang dapat ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya jika debitur wanprestasi

Penjaminan hak atas tanah dengan hak tanggungan, merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian kredit, sehingga dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perjanjian, antara lain adalah berlakunya Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Adapun pengertian hukum perikatan adalah :

Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Didalam pengertian tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Hubungan Hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak dan
4. Prestasi

Obyek dari perikatan adalah sebagaimana terdapat pada Pasal 1234 KUHPerdata yaitu :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Maka obyek dari perikatan adalah prestasi, yang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan sesuatu.

Dalam perikatan terdapat dua pihak yang saling memberikan hak dan kewajibannya. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur".

Sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang dan perbuatan manusia dan undang-undang melulu sedangkan sumber dari undang-undang dan perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)⁷¹

⁷¹ Purwahid Patrik, 1986. Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan), Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 3

Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan⁷².

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁷³.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dan waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatiggedaad*⁷⁴.

Berdasarkan undang-undang dikatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain,

⁷² Munir Fuady. 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hal 137

⁷³ Subekti.1988, *Hukum Perjanjian*. Pradnya Paramita.Jakarta. hal. 45.

⁷⁴ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*. Mega Point. 2001. Hal.77.

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdara)⁷⁵.

Kreditur dalam keadaan aman jika benda jaminan telah memperoleh kepastian hukum, yang dimaksud kepastian hukum atas benda jaminan adalah kepastian atas status benda jaminan, misalnya pada tanah harus memiliki sertifikat, dalam praktek kredit mikro KUPEDAS, jaminan tanah yang teridentifikasi kepemilikannya secara hukum hanya dengan akta jual beli dapat juga diterima sebagai jaminan, hanya saja disyaratkan untuk ditingkatkan haknya dan bukti kepemilikannya dalam bentuk sertifikat, yang dapat diproses peningkatannya akta jual belinya oleh Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia setempat dengan persetujuan dan biaya yang ditanggung oleh debitur.

Dalam pemberian pinjaman kepada debitur biasanya pihak BRI menginginkan penjaminan tanah yang telah bersertifikat dengan hak tanggungan, karena sebagai Bank Pemerintah pihak kreditur harus mempunyai kedudukan sebagai pemegang hak tanggungan, karena dengan demikian kreditur mempunyai hak preference terhadap obyek hak tanggungan, jika debitur wanprestasi.

⁷⁵ I.G. Rai Widjaya. *Loc Cit.*

Pada kredit mikro Kupedes biasanya pembebanan benda jaminan atau sertipikat dengan Hak Tanggungan sering tidak dilaksanakan, disebabkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi bahwasanya kredit mikro Kupedes diperuntukkan bagi ekonomi skala kecil juga jumlah penyaluran kreditnya tidak besar, sehingga apabila jaminan harus dibebankan Hak tanggungan jelas membutuhkan biaya, yang nantinya dikhawatirkan biaya-biaya tersebut akan membebani debitur kredit mikro Kupedes.

Pada saat bank melakukan pemberian kredit terhadap debitur, tentulah mengharapkan kredit yang diberikan dapat dikembalikan pada saat yang tepat sehingga kreditur tidak perlu melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Namun demikian terkadang harapan jauh dari kenyataan yang ada. Dalam kondisi ekonomi demikian sulit dengan tingkat persaingan tinggi, menyebabkan banyaknya usaha berguguran, hal demikian memacu bank untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mengamankan kredit.

Berpijak dari hal tersebut kreditur sebagai yang berkepentingan hendaknya waspada akan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Misalnya jika saat sertipikat belum selesai diproses, namun

debitur wanprestasi, sedangkan kredit sudah terlanjur diberikan oleh kreditur.

Dalam keadaan demikian, kreditur tidak langsung kreditnya dalam keadaan macet. berdasarkan kolektibilitasnya telah memutuskan bahwa Penggolongan kredit ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 sebagai berikut : Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet.

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini :

- Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan;

2. Dalam Perhatian Khusus, terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan); atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan);

- Terdapat tunggakan bunga tetapi : belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1

bulan; atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan;

- Terdapat keterlambatan pembayaran angsuran tetapi belum melampaui 15 hari kerja.

3. Kredit Kurang Lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Kredit yang mempunyai keterlambatan pembayaran angsuran tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

4. Kredit diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi kredit tersebut (akan) dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau kredit tidak dapat diselamatkan dari agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang.

5. Kredit macet, yaitu:

- a. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti angka 1, 2 dan 3;

- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Jika belum dikategorikan macet, maka kredit akan tetap diberikan.

Setelah jangka waktu tertentu keadaan tidak berubah, artinya tunggakan tidak segera dilunasi oleh debitur, maka debitur akan diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu baru dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan negeri setempat. Pada bank pemerintah, kredit macet akan diserahkan kepada KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) untuk dilakukan penyelesaiannya secara hukum. Namun sebelumnya penagihan dapat terus dilakukan kepada pihak debitur hingga jaminan akan dilelang guna melunasi utangnya kepada kreditur.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah.

Upaya-upaya preventif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan supaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.

Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dan penyelamatan kredit tersebut dapat berupa :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit;

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan dana bank dan/atau;
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit bank; dan/atau;
- Konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitur dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya.

Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah tersebut. Karena itu untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit;
- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada

pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada KP2LN.
2. Proses Gugatan Perdata.
3. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase.

Idealnya, dalam suatu proses pemberian kredit perbankan, Legal Officer lebih banyak aktif dan berperan mulai pada saat analisis pendahuluan sampai pada saat pencairannya. Selebihnya, akan lebih banyak ditangani oleh pejabat perkreditan yang oleh perbankan modern saat ini dikenal dengan "*Account Officer*". Sedangkan apabila kredit yang diberikan tersebut menjadi bermasalah, maka akan diserahkan dan diambil alih oleh suatu bagian lagi yang dikenal dengan "*Settlement Departmen*".

Startegi perbankan di atas merupakan hal-hal umum atau merupakan tindakan standart dari perbankan dalam memperlakukan kredit macet, namun dalam kredit mikro kupedes, kebijakan-kebijakan di atas dilakukan terhadap kredit dengan *plafond* Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Terhadap palfond kredit di bawah Rp.20.000.000 (dua puluh juta) penyelesaian sengketa dilakukan dengan desakan-desakan kepada debitur mengenai kapan waktu yang pasti pinjaman kredit/angsuran akan dibayar dan tindakan musyawarah lainnya seperti mencarikan pembeli untuk membeli jaminan tanah milik debitur.

Strategi tindakan tersebut di atas menurut penulis sangat sesuai mengingat, bahwa kredit mikro kupedes peruntukannya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang memiliki kesederhanaan dalam manajemen usahanya, disamping itu, banyaknya penyaluran kredit mikro kupedes yang bernilai di bawah lima jutaan, menyebabkan banyak juga objek jaminan tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, keadaan ini walaupun berakibat tidak kuatnya hak BRI selaku kreditur dalam upaya eksekusi objek jaminan. Namun hal ini ditempuh karena jika dibebankan Hak Tanggungan akan tidak efektif dan efisien bila dengan nilai yang kecil tersebut, BRI selaku kreditur harus mengurus upaya eksekusi objek jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit mikro kupedes dalam praktek dilaksanakan dengan cara sederhana, dimulai dengan permohonan, pemeriksaan berkas, analisis kebenaran dokumen, observasi ke debitur menyangkut penelitian kebenaran usaha dan kebenaran jaminan yang selanjutnya dilaksanakan analisis persetujuan yang akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pencairan permohonan pinjaman kepada debitur, pelaksanaan perjanjian kredit mikro karena sangat sederhana menjadikan prosesnya cepat namun karena hal tersebut memberikan kelemahan, seperti seringnya dimasukkan jenis usaha yang sebenarnya tidak berprospek dan tidak memiliki manajemen yang baik berupa pembukuan usaha.
2. Berkaitan dengan proses penyaluran kredit mikro kupedes yang sederhana tersebut, sering juga terjadi tindakan wanprestasi oleh

debitur, dalam kondisi demikian dikarenakan umumnya dalam kredit mikro kupedes benda penjamin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai prosedur penjaminan dalam lembaga jaminan yang digunakan, maka apabila terjadi wanprestasi memberikan kesulitan bagi kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan, sehingga sering penyelesaiannya ditempuh dengan penagihan dan desakan yang lebih sering kepada debitur untuk menuntut kapan debitur dapat membayar angsurannya, beruntung dalam penyaluran kredit mikro kupedes, BRI unit berhubungan dengan masyarakat strata sosial menengah kebawah yang memiliki budaya malu yang kuat, sehingga desakan-desakan tersebut menjadi cara yang efektif menyelesaikan masalah wanprestasi serta sebagai motifasi untuk tidak berbuat wanprestasi.

B. Saran

Walaupun dari kesimpulan di atas masalah-masalah wanprestasi selama ini dapat diminimalisasi, bukanlah berarti tidak memungkinkan tindakan wanprestasi dalam kredit mikro kupedes dapat meningkat ke posisi yang mengkhawatirkan seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan konsumerisme masyarakat

moderen, sehingga banyak kepentingan modal disalah gunakan untuk kepentingan. Guna mengatasi hal-hal demikian maka perlu kiranya diperhatikan :

1. Sebaiknya BRI lebih memperketat dan lebih teliti dalam menganalisa usaha maupun karakter debitur, guna mengetahui persis kemampuan bayar dan peruntukan modal kredit tersebut, agar benar-benar kredit mikro kupedes digunakan untuk kepentingan usaha.
2. BRI perlu merumuskan kembali strategi dalam penentuan lembaga jaminan dalam penyaluran kredit mikro kupedes, untuk mengantisipasi bila debitur wanprestasi, return capital dapat segera diproses, untuk memberikan efektifitas terhadap modal yang bergulir, dan tidak lebih lama menunggu, hal ini berkaitan dengan kemungkinan memilih pihak ketiga lewat perjanjian *cessie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.
- , 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung.
- , 1998, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- , (editor) 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady. Munir. 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi. Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Khairandy. Ridwan, 2003 " Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak" . Pasca Sarjana FHUI, Jakarta.
- Muhammad. Abdul Kadir. 2000, *Hukum Perikatan*. Citra. Aditya Bakti, Jakarta.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Patrik, Purwahid. 1982. *Buku Asas Asas Hukum Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- , 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1986. *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2001. *Hukum Jaminan, Edisi revisi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Rai Widjaya. I.G., *Merancang Suatu Kontrak*. Mega Point. 2001.
- Robinson. Merguerite S. 2004, *The Micro Finance Revolution- Revolusi Keuangan Mikro*, Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 1999. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto. Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Soewarso, Indrawati. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

- Subekti. R. 1988, *Hukum Perjanjian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- , 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutopo.H.B., 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Yunanto, 2000, *Aspek-aspek Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Undang-Undang/Peraturan-Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran BI nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang "Kualitas Aktiva Produktif".

Makalah :

Patrik. Purwahid, "Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat", makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

Brosur Kupedes, terbitan Bank Rakyat Indonesia.